

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen bangsa Indonesia untuk hidup dalam suatu negara yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) telah dicetuskan secara implisit dalam UUD 1945 sebagai pengejawantahan dari Pancasila. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasar atas hukum dan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Semua aspek kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya senantiasa diatur dan ditata oleh hukum, baik hukum tertulis yaitu hukum positif yang dibuat dan disusun oleh badan legislatif maupun hukum tidak tertulis yang hidup dan ditaati dalam masyarakat (hukum adat).² Dengan demikian hukum di Indonesia dijadikan sebagai aturan permainan yang telah

¹ Dalam penjelasan UUD 1945 Amandemen disebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan konstitusional dimana pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar). Hal ini semakin memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum manakala kita melihat implementasi pernyataan tersebut dalam pasal-pasal UUD 1945 Amandemen. Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen. Adapun ciri dari negara hukum yang baru (*welfare state*) antara lain: (1) perlindungan konstitusional; (2) badan kehakiman yang bebas; (3) Pemilu yang bebas; (4) kebebasan menyatakan pendapat; (5) kebebasan untuk berserikat; (6) Pendidikan Kewarganegaraan. Lihat Marbun, SF dan MD, Mahfud. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. Hal 46

² Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Lihat Marsita, Boedi Dwi Yani Sri. 1984. *Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal., 13

disepakati bersama. Oleh karena itu hukum wajib untuk dipertahankan dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik penguasa maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana, tidak hanya berorientasi pada pembaharuan hukum pidana materiil saja, namun juga harus berorientasi pada hukum formil dan pelaksanaannya. Sebagai realisasi, maka dalam bidang hukum formil diadakan pembaharuan hukum melalui pencabutan ketentuan *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³ Di sisi lain, sebagai negara hukum diharapkan dengan adanya KUHAP akan lebih menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para *justisiabel*.⁴

Berdasarkan Pasal 120 KUHAP, maka penyidik sebagai salah satu struktur dalam penegakan hukum mempunyai wewenang untuk meminta bantuan kepada ahli (orang ahli) dalam membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.⁵ Adapun peranan ahli tersebut dalam tahap proses pemeriksaan

³ Visi dari pembangunan hukum tersebut dapat kita lihat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara dimana pada dasarnya Indonesia perlu mengadakan pembangunan serta pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan perundang-undangan dengan dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu. Selain itu juga berusaha untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum serta sikap dan perilaku para pelaksana aparat penegak hukum serta sikap dan perilaku para pelaksana penegak hukum, meningkatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum dengan aparatnya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Pembangunan dan pembinaan hukum yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tersebut merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis Besar Haluan Negara.

⁴ *Justisiabel* dapat diartikan sebagai orang yang mencari keadilan. Dalam hal ini *justisiabel* tidak hanya ditujukan kepada korban saja, namun tersangka atau terdakwa juga merupakan justisiabel. Lihat Prakoso, Djoko. 1985. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁵ Ahli sendiri dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) melalui keterangan secara lisan maupun tulisan (surat). Begitu besarnya peran ahli (saksi ahli) tersebut maka keterangannya dipandang sebagai *coming vat hets bewijs* (rajanya pembuktian) dan

tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana kealpaan. Pada hakekatnya perbuatan melanggar hukum tidak hanya merupakan masalah jasmaniah saja, namun juga masalah rohaniah (kejiwaan). Prinsip ini dirumuskan dalam adagium yuridis yang termasyur yakni “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau “tidak ada suatu perbuatan yang salah kalau tidak juga jiwa yang bersalah.”⁶

Pada bulan Juli 2006 masyarakat Surakarta dikejutkan dengan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama atau lebih sering disebut dengan “kasus lesbianisme”. Pada penyidikan pada tindak pidana terhadap kesusilaan tersebut, penyidik meminta bantuan kepada ahli psikologi atau psikolog. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari psikolog tersebut, maka didapatkan hasil bahwa pelaku tindak pidana tersebut memang mempunyai kecenderungan untuk menyukai sesama jenis (wanita).⁷ Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut memutuskan untuk tidak memberikan terapi kepada pelaku tindak pidana. Hal ini cukup bertolak belakang dari saran Tim Psikologi sebagai ahli. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana tersebut, diperoleh pernyataan bahwa pada dasarnya korban dipaksa oleh pelaku untuk melakukan dan atau menuruti permintaan pelaku untuk

mempunyai posisi dan akibat hukum yang kuat.

⁶ Pariaman, Hasan Basri Saanin Dt Tan.1983. *Psikiater dan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Dalam kacamata ahli jiwa (psikiater, psikolog, dll), pernyataan “jiwa yang bersalah” cenderung dimaksudkan pada keadaan jiwa yang mengalami abnormalitas (disfungsi kejiwaan).

⁷ Berkas Perkara No Pol: BP/219/VII/2006/Reskrim.

melakukan hubungan seksual. Namun hal ini berkebalikan dengan hasil pernyataan beberapa saksi serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada dasarnya mereka, dalam hal ini yaitu korban dan pelaku, adalah pasangan lesbian. Berpijak pada perbedaan pernyataan yang saling berkebalikan ini, maka dikhawatirkan akan terjadi ekses yang *destruktif* pula.⁸

Dalam hal pemidanaan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pemidanaan diharapkan dapat mewujudkan atau menciptakan kepuasan dalam masyarakat sebagai implikasi pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana serta di sisi yang lain mampu menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dari pelaku tindak pidana tersebut. Lebih jauh, dengan adanya perlindungan hak-hak dari pelaku tindak pidana tersebut diharapkan dapat membawa pelaku tersebut pada perbaikan diri. Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal.⁹ Berpijak pada uraian di atas, maka pemeriksaan psikologis merupakan sesuatu yang teramat penting sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap yang bersangkutan demi kebenaran materiil itu sendiri. Lebih lanjut, adanya pemeriksaan psikologis setidaknya dapat menghindarkan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana serta dapat lebih berorientasi pada tujuan pemidanaan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan ilmiah dengan judul “Urgensi Pemeriksaan Psikologis Pada

⁸ Kartini, Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju

⁹ Lihat Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Pemidanaan (Studi Kasus Lesbianisme di Pengadilan Negeri Surakarta).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Apa urgensi pemeriksaan psikologis terhadap pelaku tindak pidana kasus lesbianisme dalam rangka pemidanaan?
- 2 Bagaimana putusan pidana oleh hakim dalam kasus lesbianisme tersebut bila ditinjau dari hukum pidana dan psikologi kriminal?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada perumusan masalah di atas, maka penulisan bertujuan:

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mendeskripsikan urgensi pemeriksaan psikologis terhadap pelaku tindak pidana kasus lesbianisme dalam rangka pemidanaan;
 - b) Untuk mendeskripsikan putusan pidana oleh hakim dalam kasus lesbianisme tersebut bila ditinjau dari hukum pidana dan psikologi kriminal.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang dapat memberikan jawaban di mana data tersebut kemudian digunakan dalam rangka penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh dan menyelesaikan tugas akhir, guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu pengetahuan

Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap setidaknya hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangsih psikologi dan hukum sendiri demi memperoleh kebenaran materiil.

2. Bagi Masyarakat dan Aparat Hukum

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini baik masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat lebih memahami dan mengetahui urgensi dari pemeriksaan psikologis pelaku tindak pidana dalam rangka menuju kepada pemidanaan yang lebih baik.

3. Bagi Diri Sendiri

Dapat memberi wawasan serta bekal bagi penulis untuk dikemudian hari khususnya dalam tataran praktis.

E. Kerangka Berfikir

Dalam persepsinya, Leon Duguit berasumsi hukum merupakan aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang penggunaannya pada saat itu disudahkan atau disahkan atas suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Hukum pidana sebagai salah satu cabang dari hukum merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger).¹⁰

¹⁰ Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun yang dimaksud syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Lihat Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

Pada bidang hukum pidana, hanya kelakuan-kelakuan yang dapat menyebabkan hakim dapat menjatuhkan hukuman dapat dipertanggung-jawabkan kepada pembuat. Pertanggung-jawaban ini adalah pertanggung-jawaban pidana di mana terdapat hubungan yang erat dengan melawan hukum serta kesalahan sebagai unsur-unsur peristiwa pidana. Apabila kelakuan yang bersangkutan tidak melawan hukum, maka menurut hukum pidana positif kelakuan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada pembuat.

Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya diancam dengan sanksi. Di sisi lain, kejahatan sebagai masalah psikologis berarti perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹¹

Dalam konteks yuridis, homoseksualisme dengan spesifikasi lesbianisme merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 292 KUHP. Adapun bunyi Pasal 292 KUHP adalah

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Berdasarkan pasal di atas, maka secara tersurat dapat kita ketahui bahwa perbuatan cabul dari jenis kelamin yang sama (homoseksualitas) merupakan kejahatan terhadap kesusilaan (*ontuchtige handelingen*). Sebagai catatan, perbuatan cabul yang bersifat homoseksual, baik gay maupun lesbianisme,

¹¹ Prakoso, Djoko dan Ismunarso, Agus. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara

sebagaimana dimaksud Pasal 292 tersebut hanya ditujukan pada perbuatan oleh orang dewasa terhadap anak. R. Soesilo menginterpretasikan homoseksualitas (lesbianisme) sebagai perbuatan (cabul) yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dimana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Adapun perbuatan cabul yang dimaksud tersebut misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹²

Dalam konteks psikologi kriminal, maka tindak pidana homoseksual (lesbianisme) merupakan suatu tindak pidana yang diakibatkan karena abnormalitas yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut. Kartono Kartini mendefinisikan homoseksualitas sebagai relasi seks dengan jenis kelamin sama atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama.¹³ Oleh karena itu, lesbianisme sendiri merupakan kecenderungan memiliki hasrat-hasrat seksual atau mengadakan hubungan dengan anggota dari jenis kelamin yang sama yaitu wanita.¹⁴

Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Di sisi lain, sifat-sifat yang jahat dan yang baik dari tertuduh wajib

¹² Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hal 212

¹³ Kartini, Kartono. Op. Cit., Hal 247

¹⁴ Ibid., Hal 249

diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter jiwa, dan sebagainya.¹⁵

Pemeriksaan psikologis merupakan suatu kegiatan guna mengetahui personalitas atau keadaan jiwa seseorang melalui kegiatan mengumpulkan data (melalui metode dan teknik tertentu), menganalisa data (melalui beberapa pendekatan teori dan psikodinamika), menarik kesimpulan dalam bentuk diagnosa. Pemeriksaan psikologis terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong *insania moralis* merupakan sesuatu yang urgen (penting) dalam kaitannya terhadap pemidanaan yang akan diberikan oleh hakim.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana bertujuan untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Penulis berusaha untuk mendeskripsikan pentingnya pemeriksaan psikologis pada pelaku tindak

¹⁵ Hartanto dan Murofiquidin. 2001. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Undang-Undang Pelengkapanya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

¹⁶ *Insania moralis* merupakan seseorang yang bilamana dipandang dari sudut kejiwaannya (*zedelijke gevolen*) adalah sakit, tetapi keadaan akalanya (*verstandelijke gesteldheid*) adalah sehat.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal 10

pidana kasus lesbianisme dalam rangka pemidanaan serta mendeskripsikan putusan hakim melalui sinkronisasi hasil pemeriksaan psikologis dengan pertimbangan putusan hakim dalam kacamata psikologi kriminal serta konteks hukum pidana. Pendekatan penelitian dilakukan dengan memakai model pendekatan yuridis (normatif) melalui penekanan pada implementasi peraturan perundang-undangan dalam kebijakan hukum (*in concreto*). Pada penelitian ini kebijakan hukum tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 303/Pid.B/2006/PN.Ska.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan data yang diteliti, maka fokus kajian penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari berita acara pemeriksaan objek penelitian, artikel ilmiah, peraturan-peraturan perundangan, arsip dan publikasi dari lembaga terkait. Beberapa data sekunder tersebut di antaranya Berkas Perkara No Pol: BP/219/VII/2006/Reskrim serta Putusan No: 303/Pid.B/2006/PN.Ska.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, peraturan perundangan dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak penelitian dimulai sampai penelitian selesai. Langkah-langkah menganalisis dalam penelitian ini dimulai dengan menentukan premis mayor terlebih dahulu. Premis mayor yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundangan (khususnya pasal-pasal dalam KUHP, KUHPA, UU Kekuasaan Kehakiman, dan sebagainya) serta pendapat yang sejalan dengan penelitian di antaranya pendapat dari Satjipto Rahardjo, Sudarto, Muladi, Kartono Kartini dan lain sebagainya. Kedua, analisis dilanjutkan dengan menentukan premis minor dengan meneliti Putusan Hakim PN Surakarta No 303/Pid.B/2006/PN.Ska. Terakhir, penulis akan menarik konklusi yang diperoleh dari membandingkan serta mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah (premis minor) dengan premis mayor.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis menjadi 4 (empat) bab dengan tujuan memudahkan untuk setiap pokok pembahasan. Adapun bab tersebut antara lain:

Bab Pendahuluan di mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab Tinjauan Pustaka yang meliputi pembahasan di antaranya pengertian tindak pidana dan unsurnya; hakim dalam pemidanaan; tinjauan konsepsi tentang homoseksual; psikolog dan faktor yang mempengaruhi kewenangannya dalam acara pidana.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana pada bagian pertama penulis mencoba untuk mengemukakan urgensi pemeriksaan psikologis pelaku tindak pidana kasus lesbianisme dalam kaitannya dengan pemidanaan. Pada bagian kedua, penulis akan mendeskripsikan putusan pidana oleh hakim dalam kasus lesbianisme tersebut bila ditinjau dari hukum pidana dan psikologi kriminal.

Bab Penutup dimana berisi kesimpulan penulisan serta saran yang ingin penulis kemukakan terkait dengan materi penulisan.